



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 61 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

Pasal 2

- (1) Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.
- (2) Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.867.829.270.075,00 (satu triliun delapan ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh puluh lima rupiah);
 - b. belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.936.652.223.306,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh enam milyar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam rupiah); dan
 - c. defisit direncanakan sebesar Rp68.822.953.231,00 (enam puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
 - d. pembiayaan Daerah, terdiri atas:
 1. penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp125.322.953.231,00 (seratus dua puluh lima milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
 2. pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp56.500.000.000,00 (lima puluh enam milyar lima ratus juta rupiah); dan
 3. pembiayaan neto direncanakan sebesar Rp68.822.953.231,00 (enam puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
 - e. Sisa lebih pembiayaan anggaran Daerah tahun berkenaan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2) huruf a bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp387.585.753.575,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp121.745.000.000,00 (seratus dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp248.858.829.975,00 (dua ratus empat puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.375.127.000,00 (enam milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.606.796.600,00 (sepuluh milyar enam ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp121.745.000.000,00 (seratus dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) terdiri atas:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - d. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - f. pajak barang dan jasa tertentu;
 - g. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
 - h. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. direncanakan sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah).
- (6) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah).
- (7) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp28.400.000.000,00 (dua puluh delapan milyar empat ratus juta rupiah).
- (8) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar

Rp45.200.000.000,00 (empat puluh lima milyar dua ratus juta rupiah).

- (9) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.600.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan Rp248.858.829.975,00 (dua ratus empat puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp234.171.668.938,00 (dua ratus tiga puluh empat milyar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.403.661.037,00 (empat belas milyar empat ratus tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp283.500.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.375.127.000,00 (enam milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), pada bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.606.796.600,00 (sepuluh milyar enam ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) terdiri atas:
 - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama Daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. pendapatan bunga;
 - f. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
 - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - i. pendapatan dari pengembalian; dan
 - j. pendapatan badan layanan umum Daerah.
- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp569.990.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp195.500.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah).
- (5) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- (6) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.441.725.681,00 (empat milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).
- (7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (8) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (9) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (10) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.330.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- (11) Pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.880.580.919,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.480.243.516.500,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh milyar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.379.577.746.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh

sembilan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.665.770.500,00 (seratus milyar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.379.577.746.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. dana desa;
 - b. dana bagi hasil;
 - c. dana alokasi umum; dan
 - d. dana alokasi khusus.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.869.629.000,00 (seratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.930.581.000,00 (empat puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (4) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp904.524.354.000,00 (sembilan ratus empat milyar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp293.253.182.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar dua ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.665.770.500,00 (seratus milyar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan;
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.789.983.500,00 (sembilan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.875.787.000,00 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 12

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 13

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b bersumber dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.509.173.321.454,47 (satu triliun

lima ratus sembilan milyar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah empat puluh tujuh sen) terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp977.880.747.250,24 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah dua puluh empat sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp482.911.533.104,23 (empat ratus delapan puluh dua milyar sembilan ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat rupiah dua puluh tiga sen).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.504.748.100,00 (delapan milyar lima ratus empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.622.545.000,00 (tiga puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.253.748.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp977.880.747.250,24 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus

delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah dua puluh empat sen) terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
- c. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah;
- d. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
- e. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah; dan
- f. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp691.880.426.821,86 (enam ratus sembilan puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah delapan puluh enam sen).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp249.284.441.557,38 (dua ratus empat puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh delapan sen).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.225.365.049,00 (dua puluh tiga milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp809.675.238,00 (delapan ratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan

sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- (7) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.687.718.584,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp482.911.533.104,23 (empat ratus delapan puluh dua milyar sembilan ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat rupiah dua puluh tiga sen) terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.199.841.141,41 (delapan puluh dua milyar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah empat puluh satu sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp180.110.135.588,57 (seratus delapan puluh milyar seratus sepuluh juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah lima puluh tujuh sen).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.691.703.196,40 (tujuh belas milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus

tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah empat puluh sen).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.003.971.830,85 (tiga puluh empat milyar tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah delapan puluh lima sen).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.692.591.600,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp42.869.148.282,00 (empat puluh dua milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp119.344.141.465,00 (seratus sembilan belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 17

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.504.748.100,00 (delapan milyar lima ratus empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah), pada belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 18

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.622.545.000,00 (tiga puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.306.361.000,00 (satu milyar tiga ratus enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.239.480.000,00 (empat belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.732.504.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta lima ratus empat ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.344.200.000,00 (dua puluh milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.253.748.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

- (2) Belanja bantuan sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp301.248.000,00 (tiga ratus satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.277.500.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp164.472.246.048,18 (seratus enam puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah delapan belas sen) terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.363.081.828,77 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah tujuh puluh tujuh sen).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.814.490.780,93 (tiga puluh sembilan milyar delapan

ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah sembilan puluh tiga sen).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp94.061.486.988,48 (sembilan puluh empat milyar enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh delapan sen).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp970.986.450,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 21

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.363.081.828,77 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah tujuh puluh tujuh sen) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal komputer;

- i. belanja modal alat keselamatan kerja
 - j. belanja modal rambu-rambu;
 - k. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - l. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp899.234.966,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp367.932.170,99 (tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh sembilan sen).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp528.100,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp964.014.516,60 (sembilan ratus enam puluh empat juta empat belas ribu lima ratus enam belas rupiah enam puluh sen).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.403.930.006,00 (satu milyar empat ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp264.481.423,62 (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh dua sen).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.229.304.440,00 (tiga milyar dua ratus dua puluh

sembilan juta tiga ratus empat ribu empat ratus empat puluh rupiah).

- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp819.121.213,56 (delapan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah lima puluh enam sen).
- (10) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp96.665.090,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan puluh rupiah).
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp351.195.700,00 (tiga ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp11.015.923.068,00 (sebelas milyar lima belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp9.950.751.134,00 (sembilan milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.814.490.780,93 (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah sembilan puluh tiga sen) terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.580.835.892,93 (tiga puluh enam milyar lima ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah sembilan puluh tiga sen).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.233.654.888,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp94.061.486.988,48 (sembilan puluh empat milyar enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah empat puluh delapan sen) terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.331.919.293,80 (delapan puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh sen).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.256.038.000,00 (sebelas milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.473.529.694,68 (satu milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah enam puluh delapan sen).

Pasal 25

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 970.986.450,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan; dan
 - b. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.787.800,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp969.198.650,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Pasal 26

Belanja modal aset lainnya dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp162.200.000,00 (seratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), pada belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.

Pasal 27

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp6.829.499.241,05 (enam milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah lima sen).

Pasal 28

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp256.177.156.562,30 (dua ratus lima puluh enam milyar seratus tujuh puluh tujuh juta

seratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh sen) terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.859.597.562,30 (empat belas milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh sen).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp241.317.559.000,00 (dua ratus empat puluh satu milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.859.597.562,30 (empat belas milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh sen) terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.174.500.000,00 (dua belas milyar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.685.097.562,30 (dua milyar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah tiga puluh sen).

Pasal 30

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp241.317.559.000,00 (dua ratus empat puluh satu milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), pada belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 31

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c bersumber dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 32

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp125.322.953.231,00 (seratus dua puluh lima milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - c. penerimaan pembiayaan utang daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.120.000.000,00 (lima puluh lima milyar seratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp202.953.231,00 (dua ratus dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Penerimaan pembiayaan utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah).

Pasal 33

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp56.500.000.000,00 (lima puluh enam milyar lima ratus juta rupiah), dipergunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 34

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp68.822.953.231,00 (enam puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp68.822.953.231,00 (enam puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 35

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2026;
- b. Lampiran II : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2026;

- c. Lampiran IIIa : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah tahun anggaran 2026;
- d. Lampiran IIIb : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah tahun anggaran 2026;
- e. Lampiran IVa : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2026;
- f. Lampiran IVb : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2026;
- g. Lampiran Va : Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2026;
- h. Lampiran Vb : Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2026;
- i. Lampiran VIa : Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten tahun anggaran 2026;
- j. Lampiran VIb : Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah

kepada pemerintah kota tahun anggaran 2026;

- k. Lampiran VIc : Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa tahun anggaran 2026;
- l. Lampiran VII : Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2026;
- m. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2026; dan
- n. Lampiran IX : Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten pada daerah perbatasan dalam peraturan daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara tahun anggaran 2026.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Desember 2025
BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI

NIP. 19671223199203 2 004



KABUPATEN TRENGGALEK
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	387.585.753.575,00
4.1.01	Pajak Daerah	121.745.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	500.000.000,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	400.000.000,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	400.000.000,00
4.1.01.09.002	Pajak Reklame Kain	100.000.000,00
4.1.01.09.002.00001	Pajak Reklame Kain	100.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	45.000.000,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	45.000.000,00
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	45.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00
4.1.01.14.009	Pajak Felspar	200.000.000,00
4.1.01.14.009.00001	Pajak Felspar	200.000.000,00
4.1.01.14.012	Pajak Granit/Andesit	50.000.000,00
4.1.01.14.012.00001	Pajak Granit/Andesit	50.000.000,00
4.1.01.14.019	Pajak Marmer	50.000.000,00
4.1.01.14.019.00001	Pajak Marmer	50.000.000,00
4.1.01.14.023	Pajak Pasir dan Kerikil	400.000.000,00
4.1.01.14.023.00001	Pajak Pasir dan Kerikil	400.000.000,00
4.1.01.14.030	Pajak Tanah Liat	700.000.000,00
4.1.01.14.030.00001	Pajak Tanah Liat	700.000.000,00
4.1.01.14.037	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000.000,00
4.1.01.14.037.00001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	100.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	22.000.000.000,00
4.1.01.15.001	PBBP2	22.000.000.000,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	22.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.500.000.000,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	13.500.000.000,00
4.1.01.16.001.00001	BPHTB-Pemindahan Hak	13.500.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	28.400.000.000,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	4.500.000.000,00
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran	500.000.000,00
4.1.01.19.001.00002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	4.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	22.500.000.000,00
4.1.01.19.002.00001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	22.500.000.000,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	650.000.000,00
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel	640.000.000,00
4.1.01.19.003.00010	PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel	10.000.000,00
4.1.01.19.004	PBJT-Jasa Parkir	100.000.000,00
4.1.01.19.004.00001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	100.000.000,00
4.1.01.19.005	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	650.000.000,00
4.1.01.19.005.00001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	47.500.000,00
4.1.01.19.005.00002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	2.500.000,00
4.1.01.19.005.00005	PBJT-Pameran	550.000.000,00
4.1.01.19.005.00008	PBJT-Permainan Ketangkasan	15.000.000,00
4.1.01.19.005.00009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	20.000.000,00
4.1.01.19.005.00012	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	15.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	45.200.000.000,00
4.1.01.20.001	Opsen PKB	45.200.000.000,00
4.1.01.20.001.00001	Opsen PKB	45.200.000.000,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	10.600.000.000,00
4.1.01.21.001	Opsen BBNKB	10.600.000.000,00
4.1.01.21.001.00001	Opsen BBNKB	10.600.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	248.858.829.975,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	234.171.668.938,00
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	224.517.174.352,00
4.1.02.01.001.00001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	62.448.978.400,00
4.1.02.01.001.00005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	159.568.195.952,00
4.1.02.01.001.00006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	2.500.000.000,00
4.1.02.01.002	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	145.000.000,00
4.1.02.01.002.00001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	145.000.000,00
4.1.02.01.004	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.691.228.000,00
4.1.02.01.004.00001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.691.228.000,00
4.1.02.01.005	Retribusi Pelayanan Pasar	3.679.000.000,00
4.1.02.01.005.00001	Retribusi Pelataran	760.200.000,00
4.1.02.01.005.00002	Retribusi Los	1.192.800.000,00
4.1.02.01.005.00003	Retribusi Kios	1.726.000.000,00
4.1.02.01.013	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	139.266.586,00
4.1.02.01.013.00001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	139.266.586,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	14.403.661.037,00
4.1.02.02.001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.659.508.162,00
4.1.02.02.001.00001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	297.521.125,00
4.1.02.02.001.00002	Retribusi Penyewaan Tanah	1.613.777.037,00
4.1.02.02.001.00003	Retribusi Penyewaan Bangunan	204.210.000,00
4.1.02.02.001.00004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	420.000.000,00
4.1.02.02.001.00005	Retribusi Pemakaian Ruangan	72.200.000,00
4.1.02.02.001.00007	Retribusi Pemakaian Alat	51.800.000,00
4.1.02.02.002	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	688.452.575,00
4.1.02.02.002.00002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	688.452.575,00
4.1.02.02.003	Retribusi Tempat Pelelangan	600.000.000,00
4.1.02.02.003.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	600.000.000,00
4.1.02.02.004	Retribusi Terminal	118.424.000,00
4.1.02.02.004.00001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	77.554.500,00
4.1.02.02.004.00002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	40.869.500,00
4.1.02.02.005	Retribusi Tempat Khusus Parkir	510.078.490,00
4.1.02.02.005.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	510.078.490,00
4.1.02.02.006	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	388.998.346,00
4.1.02.02.006.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	388.998.346,00
4.1.02.02.009	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	9.195.799.464,00
4.1.02.02.009.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	9.195.799.464,00
4.1.02.02.011	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	75.000.000,00
4.1.02.02.011.00003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	75.000.000,00
4.1.02.02.020	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	167.400.000,00
4.1.02.02.020.00001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	167.400.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	283.500.000,00
4.1.02.03.007	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	283.500.000,00
4.1.02.03.007.00001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	283.500.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.375.127.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.375.127.000,00
4.1.03.02.001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.001.919.150,00
4.1.03.02.001.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.001.919.150,00
4.1.03.02.002	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	373.207.850,00
4.1.03.02.002.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	373.207.850,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.606.796.600,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	569.990.000,00
4.1.04.01.005	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	419.990.000,00
4.1.04.01.005.00050	Hasil Penjualan Hewan-Ternak-Ternak Perah	67.000.000,00
4.1.04.01.005.00053	Hasil Penjualan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya	234.400.000,00
4.1.04.01.005.00064	Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman	118.590.000,00
4.1.04.01.008	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	150.000.000,00
4.1.04.01.008.00001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	150.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	195.500.000,00
4.1.04.03.001	Hasil Sewa BMD	7.500.000,00
4.1.04.03.001.00001	Hasil Sewa BMD	7.500.000,00
4.1.04.03.002	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	188.000.000,00
4.1.04.03.002.00001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	188.000.000,00
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	69.000.000,00
4.1.04.04.001	Hasil Kerja Sama Daerah	69.000.000,00
4.1.04.04.001.00001	Hasil Kerja Sama Daerah	69.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.000.000.000,00
4.1.04.05.001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.850.000.000,00
4.1.04.05.001.00001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.850.000.000,00
4.1.04.05.002	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	150.000.000,00
4.1.04.05.002.00001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	150.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	4.441.725.681,00
4.1.04.07.001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.441.725.681,00
4.1.04.07.001.00001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.441.725.681,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	20.000.000,00
4.1.04.08.002	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	20.000.000,00
4.1.04.08.002.00001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	20.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00
4.1.04.11.001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00
4.1.04.11.001.00001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	50.000.000,00
4.1.04.14.001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	50.000.000,00
4.1.04.14.001.00001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	50.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.330.000.000,00
4.1.04.15.004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	5.000.000,00
4.1.04.15.004.00001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	5.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.15.008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	325.000.000,00
4.1.04.15.008.00003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	225.000.000,00
4.1.04.15.008.00004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK	100.000.000,00
4.1.04.15.017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	1.000.000.000,00
4.1.04.15.017.00609	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Nasional	1.000.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	1.880.580.919,00
4.1.04.16.004	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	1.355.051.632,00
4.1.04.16.004.00001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	1.355.051.632,00
4.1.04.16.006	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	525.529.287,00
4.1.04.16.006.00001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	68.743.019,00
4.1.04.16.006.00002	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	45.000.000,00
4.1.04.16.006.00004	Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD	411.786.268,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.480.243.516.500,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.379.577.746.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	138.869.629.000,00
4.2.01.05.001	Dana Desa	138.869.629.000,00
4.2.01.05.001.00001	Dana Desa	138.869.629.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	42.930.581.000,00
4.2.01.07.001	DBH Pajak	26.768.358.000,00
4.2.01.07.001.00001	DBH PBB	2.507.292.000,00
4.2.01.07.001.00002	DBH PPh Pasal 21	6.246.453.000,00
4.2.01.07.001.00004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	18.014.613.000,00
4.2.01.07.002	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	16.162.223.000,00
4.2.01.07.002.00001	DBH SDA Minyak Bumi	14.050.018.000,00
4.2.01.07.002.00003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	9.213.000,00
4.2.01.07.002.00004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	1.655.478.000,00
4.2.01.07.002.00006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	89.291.000,00
4.2.01.07.002.00009	DBH SDA Perikanan	358.223.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	904.524.354.000,00
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	903.524.354.000,00
4.2.01.08.001.00001	DAU	903.524.354.000,00
4.2.01.08.002	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	1.000.000.000,00
4.2.01.08.002.00001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.000.000.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	293.253.182.000,00
4.2.01.09.001	DAK Fisik	27.349.890.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.001.00037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	2.499.890.000,00
4.2.01.09.001.00075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	3.350.000.000,00
4.2.01.09.001.00102	DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Layanan Dasar	19.700.000.000,00
4.2.01.09.001.00112	DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pertanian-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional	1.800.000.000,00
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	265.903.292.000,00
4.2.01.09.002.00001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	62.039.750.000,00
4.2.01.09.002.00004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	159.361.363.000,00
4.2.01.09.002.00005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	126.000.000,00
4.2.01.09.002.00007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	9.996.070.000,00
4.2.01.09.002.00012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	599.416.000,00
4.2.01.09.002.00022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	408.000.000,00
4.2.01.09.002.00027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.305.000.000,00
4.2.01.09.002.00029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	82.500.000,00
4.2.01.09.002.00030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.730.150.000,00
4.2.01.09.002.00031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00
4.2.01.09.002.00033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	8.146.409.000,00
4.2.01.09.002.00035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	17.054.079.000,00
4.2.01.09.002.00039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.409.555.000,00
4.2.01.09.002.00041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	600.000.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	100.665.770.500,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	95.789.983.500,00
4.2.02.01.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	95.789.983.500,00
4.2.02.01.001.00001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	282.000.000,00
4.2.02.01.001.00002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00
4.2.02.01.001.00003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	45.941.345.000,00
4.2.02.01.001.00004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	249.154.400,00
4.2.02.01.001.00005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	49.317.484.100,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	4.875.787.000,00
4.2.02.02.002	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	4.875.787.000,00
4.2.02.02.002.00001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	4.875.787.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.867.829.270.075,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.509.173.321.454,47
5.1.01	Belanja Pegawai	977.880.747.250,24
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	691.880.426.821,86
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	513.855.735.033,92
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	309.486.077.204,62

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	204.369.657.829,30
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	50.777.603.051,02
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	28.912.062.458,64
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	21.865.540.592,38
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.518.868.686,40
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.518.868.686,40
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	36.530.725.161,26
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	22.177.094.534,84
5.1.01.01.004.00002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14.353.630.626,42
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.989.136.048,08
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.646.335.058,98
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.342.800.989,10
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN	31.530.409.951,34
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	15.735.335.928,48
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	15.795.074.022,86
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.058.086.594,39
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.006.144.649,43
5.1.01.01.007.00002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	51.941.944,96
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.132.819,85
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.818.364,64
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10.314.455,21
5.1.01.01.009	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	37.826.727.293,49
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	24.447.670.140,76
5.1.01.01.009.00002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	13.379.057.152,73
5.1.01.01.010	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.206.709.809,85
5.1.01.01.010.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	722.010.884,45
5.1.01.01.010.00002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	484.698.925,40
5.1.01.01.011	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.569.292.372,26
5.1.01.01.011.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.123.382.761,73
5.1.01.01.011.00002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.445.909.610,53
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	249.284.441.557,38
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	41.991.187.302,96
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	38.593.124.276,16
5.1.01.02.001.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3.398.063.026,80
5.1.01.02.003	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	44.023.791.581,98
5.1.01.02.003.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	41.173.750.766,59
5.1.01.02.003.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	2.850.040.815,39

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.004	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	142.200.422,00
5.1.01.02.004.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	142.200.422,00
5.1.01.02.006	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	163.127.262.250,44
5.1.01.02.006.00009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	6.063.693,00
5.1.01.02.006.00012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	433.120,00
5.1.01.02.006.00014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	18.797.449,00
5.1.01.02.006.00015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.017.345.052,21
5.1.01.02.006.00016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	207.898.060,00
5.1.01.02.006.00019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	474.613.947,00
5.1.01.02.006.00020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	744.968.050,00
5.1.01.02.006.00021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	173.248.384,00
5.1.01.02.006.00025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	170.736.840,00
5.1.01.02.006.00026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	91.975.000,00
5.1.01.02.006.00035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	76.182.530,23
5.1.01.02.006.00036	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	22.836.037,00
5.1.01.02.006.00038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal	3.552.720,00
5.1.01.02.006.00039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	14.087.484,00
5.1.01.02.006.00040	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	12.058.948,00
5.1.01.02.006.00043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	190.786.436,00
5.1.01.02.006.00064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	98.868.717.000,00
5.1.01.02.006.00066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	50.000.000,00
5.1.01.02.006.00068	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	3.600.000,00
5.1.01.02.006.00069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	410.715.500,00
5.1.01.02.006.00070	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	60.492.646.000,00
5.1.01.02.006.00072	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	76.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.225.365.049,00
5.1.01.04.001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.054.010.000,00
5.1.01.04.001.00001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.054.010.000,00
5.1.01.04.002	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	141.371.200,00
5.1.01.04.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	141.371.200,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.003	Belanja Tunjangan Beras DPRD	125.582.320,00
5.1.01.04.003.00001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	125.582.320,00
5.1.01.04.004	Belanja Uang Paket DPRD	98.793.034,00
5.1.01.04.004.00001	Belanja Uang Paket DPRD	98.793.034,00
5.1.01.04.005	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.526.814.500,00
5.1.01.04.005.00001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.526.814.500,00
5.1.01.04.006	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	225.027.400,00
5.1.01.04.006.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	225.027.400,00
5.1.01.04.008	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00
5.1.01.04.008.00001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00
5.1.01.04.009	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.502.500.000,00
5.1.01.04.009.00001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.502.500.000,00
5.1.01.04.010	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	501.844,00
5.1.01.04.010.00001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	501.844,00
5.1.01.04.012	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.525.976.423,00
5.1.01.04.012.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	117.888.924,00
5.1.01.04.012.00002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	26.456.538,00
5.1.01.04.012.00003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.936.961,00
5.1.01.04.012.00004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.373.694.000,00
5.1.01.04.013	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.894.498.328,00
5.1.01.04.013.00001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.894.498.328,00
5.1.01.04.014	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	460.290.000,00
5.1.01.04.014.00001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	460.290.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	809.675.238,00
5.1.01.05.001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	59.660.406,00
5.1.01.05.001.00001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	59.660.406,00
5.1.01.05.002	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.530.301,00
5.1.01.05.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.530.301,00
5.1.01.05.003	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.004	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.387.420,00
5.1.01.05.004.00001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.387.420,00
5.1.01.05.005	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	413.907,00
5.1.01.05.005.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	413.907,00
5.1.01.05.006	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.575,00
5.1.01.05.006.00001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	3.575,00
5.1.01.05.007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.691.737,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.007.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.691.737,00
5.1.01.05.008	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	165.633,00
5.1.01.05.008.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	165.633,00
5.1.01.05.009	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	496.860,00
5.1.01.05.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	496.860,00
5.1.01.05.010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	506.253.000,00
5.1.01.05.010.00006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	2.525.000,00
5.1.01.05.010.00007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	20.000.000,00
5.1.01.05.010.00008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	2.400.000,00
5.1.01.05.010.00010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	100.000.000,00
5.1.01.05.010.00011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	228.000,00
5.1.01.05.010.00012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	100.000,00
5.1.01.05.010.00014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.000.000,00
5.1.01.05.010.00015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	100.000.000,00
5.1.01.05.010.00016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	60.000.000,00
5.1.01.05.010.00020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	160.000.000,00
5.1.01.05.010.00021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	54.000.000,00
5.1.01.05.011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	122.792.399,00
5.1.01.05.011.00004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	29.644.250,00
5.1.01.05.011.00006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	8.016.416,00
5.1.01.05.011.00015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	6.200.000,00
5.1.01.05.011.00017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	6.388.560,00
5.1.01.05.011.00018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	6.200.000,00
5.1.01.05.011.00019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	2.343.173,00
5.1.01.05.011.00022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	64.000.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00
5.1.01.06.001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.001.00001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.002	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.002.00001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	11.687.718.584,00
5.1.01.99.099	Belanja Pegawai BLUD	11.687.718.584,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.99.099.09999	Belanja Pegawai BLUD	11.687.718.584,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.911.533.104,23
5.1.02.01	Belanja Barang	82.199.841.141,41
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	82.172.046.899,41
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.144.053.943,00
5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.559.341.964,78
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.571.451.196,76
5.1.02.01.001.00008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	417.922.864,00
5.1.02.01.001.00009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.166.000,00
5.1.02.01.001.00010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	36.167.289,20
5.1.02.01.001.00011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	28.044.400,00
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.085.586.498,20
5.1.02.01.001.00013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	767.359.404,25
5.1.02.01.001.00014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	36.640.952,00
5.1.02.01.001.00015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	21.543.900,00
5.1.02.01.001.00016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	82.245.428,00
5.1.02.01.001.00019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	8.848.205,00
5.1.02.01.001.00020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	2.356.100,00
5.1.02.01.001.00023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	23.466.455,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	424.021.236,90
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	745.341.038,10
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.150.587.937,25
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	209.191.700,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	834.005.985,20
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	201.831.853,40
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	415.883.107,00
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	651.200.163,00
5.1.02.01.001.00034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.498.000,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	96.472.255,05
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	880.589.406,00
5.1.02.01.001.00037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.280.034.423,30
5.1.02.01.001.00038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	130.334.795,00
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	46.143.554.386,98
5.1.02.01.001.00040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	98.869.372,49
5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.743.206.061,00
5.1.02.01.001.00044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	506.634.075,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.270.526.211,05

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	453.224.425,50
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.084.352.467,00
5.1.02.01.001.00060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	4.000.000,00
5.1.02.01.001.00074	Belanja Pakaian Adat Daerah	3.030.000,00
5.1.02.01.001.00075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.790.000,00
5.1.02.01.001.00077	Belanja Pakaian Paskibraka	35.176.400,00
5.1.02.01.001.00079	Belanja Barang Sampel Pangan	7.497.000,00
5.1.02.01.002	Belanja Barang Tak Habis Pakai	27.794.242,00
5.1.02.01.002.00004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	774.400,00
5.1.02.01.002.00012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	27.019.842,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	180.110.135.588,57
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	55.696.002.482,89
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.366.461.500,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.335.650.000,00
5.1.02.02.001.00005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	3.600.000,00
5.1.02.02.001.00006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.854.800.000,00
5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	44.065.000,00
5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.400.000,00
5.1.02.02.001.00012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	465.600.000,00
5.1.02.02.001.00014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.416.455.000,00
5.1.02.02.001.00015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	443.066.000,00
5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	581.995.000,00
5.1.02.02.001.00019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	262.000.000,00
5.1.02.02.001.00020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	520.800.000,00
5.1.02.02.001.00025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	125.000.000,00
5.1.02.02.001.00026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	94.200.000,00
5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	636.643.962,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	813.792.085,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.171.848.019,10
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.051.767.760,29
5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Supir	277.256.400,00
5.1.02.02.001.00038	Belanja Jasa Tata Rias	17.100.000,00
5.1.02.02.001.00042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	685.500,00
5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.802.252.000,00
5.1.02.02.001.00049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	5.266.000,00
5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	88.756.344,00
5.1.02.02.001.00051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	21.250.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	40.652.500,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.798.571.600,00
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon	141.414.000,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	152.950.900,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	3.915.050.454,00
5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	254.500.000,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.821.091.194,00
5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman	663.409.649,50
5.1.02.02.001.00066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	55.125.000,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	676.137.500,00
5.1.02.02.001.00068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	14.970.701.500,00
5.1.02.02.001.00070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	360.000,00
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	1.725.348.400,00
5.1.02.02.001.00073	Belanja Medical Check Up	46.500.000,00
5.1.02.02.001.00079	Belanja Jasa Pengujian Sampel Pangan	88.575.815,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.684.383.400,00
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	258.520.000,00
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	30.301.081.088,00
5.1.02.02.002.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.889.975.000,00
5.1.02.02.002.00003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	23.734.480.000,00
5.1.02.02.002.00004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.873.158.400,00
5.1.02.02.002.00005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.748.200,00
5.1.02.02.002.00006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	532.200.208,00
5.1.02.02.002.00007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	386.315.280,00
5.1.02.02.002.00012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	521.550.000,00
5.1.02.02.002.00013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	354.654.000,00
5.1.02.02.003	Belanja Sewa Tanah	37.204.416,00
5.1.02.02.003.00004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	37.204.416,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.857.449.914,00
5.1.02.02.004.00003	Belanja Sewa Excavator	62.290.155,00
5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.410.021.158,00
5.1.02.02.004.00037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	120.359.084,00
5.1.02.02.004.00118	Belanja Sewa Mebel	80.750.875,00
5.1.02.02.004.00123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	171.205.620,00
5.1.02.02.004.00463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	12.823.022,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	853.304.170,00
5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	306.187.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.005.00025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	99.110.000,00
5.1.02.02.005.00041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	160.950.000,00
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel	287.056.670,00
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.270.000,00
5.1.02.02.008.00019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	9.270.000,00
5.1.02.02.009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.226.167.500,00
5.1.02.02.009.00011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.165.080.000,00
5.1.02.02.009.00012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	915.000.000,00
5.1.02.02.009.00013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	80.000.000,00
5.1.02.02.009.00014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	2.066.087.500,00
5.1.02.02.010	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	558.428.730,00
5.1.02.02.010.00017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	558.428.730,00
5.1.02.02.011	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	0,00
5.1.02.02.011.00002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00
5.1.02.02.011.00003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	0,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.191.553.727,68
5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.489.061.077,68
5.1.02.02.012.00002	Belanja Sosialisasi	358.907.650,00
5.1.02.02.012.00003	Belanja Bimbingan Teknis	1.338.325.000,00
5.1.02.02.012.00004	Belanja Diklat Kepemimpinan	5.260.000,00
5.1.02.02.015	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	581.724.360,00
5.1.02.02.015.00002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	581.724.360,00
5.1.02.02.019	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	81.797.949.200,00
5.1.02.02.019.00001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	81.797.949.200,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	17.691.703.196,40
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.914.630.270,40
5.1.02.03.002.00003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	78.000.000,00
5.1.02.03.002.00022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	15.411.765,00
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	15.512.245,00
5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	735.811.686,40
5.1.02.03.002.00096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	51.953.909,00
5.1.02.03.002.00118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	24.102.800,00
5.1.02.03.002.00123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	421.184.855,00
5.1.02.03.002.00133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	45.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	230.028.475,00
5.1.02.03.002.00409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	251.850.535,00
5.1.02.03.002.00410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	45.774.000,00
5.1.02.03.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	983.879.926,00
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	905.771.326,00
5.1.02.03.003.00004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	20.143.800,00
5.1.02.03.003.00012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	57.964.800,00
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.763.193.000,00
5.1.02.03.004.00003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	13.169.500.000,00
5.1.02.03.004.00013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	985.000.000,00
5.1.02.03.004.00031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	381.875.000,00
5.1.02.03.004.00074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	200.000.000,00
5.1.02.03.004.00126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	26.818.000,00
5.1.02.03.006	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	30.000.000,00
5.1.02.03.006.00005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	30.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	34.003.971.830,85
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.962.043.105,85
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.597.957.105,85
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.161.807.000,00
5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.152.913.000,00
5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	49.366.000,00
5.1.02.04.002	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	41.928.725,00
5.1.02.04.002.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	41.928.725,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.692.591.600,00
5.1.02.05.001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.815.591.600,00
5.1.02.05.001.00001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	262.800.000,00
5.1.02.05.001.00002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	300.000.000,00
5.1.02.05.001.00003	Belanja Beasiswa	525.000.000,00
5.1.02.05.001.00005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	3.332.191.600,00
5.1.02.05.001.00006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	36.000.000,00
5.1.02.05.001.00008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	285.200.000,00
5.1.02.05.001.00009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	74.400.000,00
5.1.02.05.002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.877.000.000,00
5.1.02.05.002.00001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.820.000.000,00
5.1.02.05.002.00002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	57.000.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	42.869.148.282,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.89.001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	42.553.982.582,00
5.1.02.89.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	42.553.982.582,00
5.1.02.89.002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	165.565.700,00
5.1.02.89.002.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	165.565.700,00
5.1.02.89.003	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	149.600.000,00
5.1.02.89.003.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	149.600.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	119.344.141.465,00
5.1.02.99.099	Belanja Barang dan Jasa BLUD	119.344.141.465,00
5.1.02.99.099.09999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	119.344.141.465,00
5.1.03	Belanja Bunga	8.504.748.100,00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	8.504.748.100,00
5.1.03.04.002	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	8.504.748.100,00
5.1.03.04.002.00001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	8.504.748.100,00
5.1.05	Belanja Hibah	37.622.545.000,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.306.361.000,00
5.1.05.01.001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	700.000.000,00
5.1.05.01.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	700.000.000,00
5.1.05.01.002	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	606.361.000,00
5.1.05.01.002.00001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	606.361.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.239.480.000,00
5.1.05.05.001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.065.000.000,00
5.1.05.05.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.065.000.000,00
5.1.05.05.002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.324.480.000,00
5.1.05.05.002.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.324.480.000,00
5.1.05.05.006	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	850.000.000,00
5.1.05.05.006.00001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	820.000.000,00
5.1.05.05.006.00003	Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	30.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.732.504.000,00
5.1.05.07.001	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.732.504.000,00
5.1.05.07.001.00001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.732.504.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	20.344.200.000,00
5.1.05.08.001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	8.965.210.000,00
5.1.05.08.001.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	8.965.210.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.08.002	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	9.823.440.000,00
5.1.05.08.002.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	9.823.440.000,00
5.1.05.08.003	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.555.550.000,00
5.1.05.08.003.00001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.555.550.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.253.748.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	301.248.000,00
5.1.06.01.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	252.000.000,00
5.1.06.01.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	252.000.000,00
5.1.06.01.002	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	49.248.000,00
5.1.06.01.002.00001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	49.248.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	675.000.000,00
5.1.06.02.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	675.000.000,00
5.1.06.02.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	675.000.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.277.500.000,00
5.1.06.04.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.277.500.000,00
5.1.06.04.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.277.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	164.472.246.048,18
5.2.01	Belanja Modal Tanah	100.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	100.000.000,00
5.2.01.01.001	Belanja Modal Tanah Persil	100.000.000,00
5.2.01.01.001.00007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	100.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.363.081.828,77
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	899.234.966,00
5.2.02.01.001	Belanja Modal Alat Besar Darat	818.114.400,00
5.2.02.01.001.00012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	818.114.400,00
5.2.02.01.003	Belanja Modal Alat Bantu	81.120.566,00
5.2.02.01.003.00004	Belanja Modal Electric Generating Set	68.376.000,00
5.2.02.01.003.00005	Belanja Modal Pompa	12.744.566,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	367.932.170,99
5.2.02.02.001	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	359.567.970,99
5.2.02.02.001.00003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	307.397.970,99
5.2.02.02.001.00004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	52.170.000,00
5.2.02.02.002	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	8.364.200,00
5.2.02.02.002.00001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.404.200,00
5.2.02.02.002.00004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	5.960.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	528.100,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.03.003	Belanja Modal Alat Ukur	528.100,00
5.2.02.03.003.00009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	528.100,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	964.014.516,60
5.2.02.04.001	Belanja Modal Alat Pengolahan	964.014.516,60
5.2.02.04.001.00002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.367.200,00
5.2.02.04.001.00006	Belanja Modal Alat Processing	925.747.316,60
5.2.02.04.001.00009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	36.900.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.403.930.006,00
5.2.02.05.001	Belanja Modal Alat Kantor	883.686.293,20
5.2.02.05.001.00004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	10.955.175,00
5.2.02.05.001.00005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	872.731.118,20
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	491.928.794,80
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel	188.232.351,80
5.2.02.05.002.00004	Belanja Modal Alat Pendingin	201.139.703,00
5.2.02.05.002.00006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	102.556.740,00
5.2.02.05.003	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	28.314.918,00
5.2.02.05.003.00002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	8.999.500,00
5.2.02.05.003.00003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	2.117.300,00
5.2.02.05.003.00004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	17.198.118,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	264.481.423,62
5.2.02.06.001	Belanja Modal Alat Studio	264.481.423,62
5.2.02.06.001.00001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	22.982.374,62
5.2.02.06.001.00002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	193.095.049,00
5.2.02.06.001.00003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	48.404.000,00
5.2.02.06.002	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00
5.2.02.06.002.00001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.229.304.440,00
5.2.02.07.001	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.229.304.440,00
5.2.02.07.001.00001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	99.896.400,00
5.2.02.07.001.00002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	196.000.000,00
5.2.02.07.001.00003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	0,00
5.2.02.07.001.00005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	130.000.000,00
5.2.02.07.001.00015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1.050.908.040,00
5.2.02.07.001.00024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	1.752.500.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	819.121.213,56
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit	394.722.632,56
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer	389.321.483,56

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10.001.00003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	5.401.149,00
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer	424.398.581,00
5.2.02.10.002.00003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	386.045.639,00
5.2.02.10.002.00004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	38.352.942,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	96.665.090,00
5.2.02.15.002	Belanja Modal Alat Pelindung	96.665.090,00
5.2.02.15.002.00001	Belanja Modal Baju Pengaman	34.377.790,00
5.2.02.15.002.00006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	62.287.300,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	351.195.700,00
5.2.02.18.001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	351.195.700,00
5.2.02.18.001.00001	Belanja Modal Rambu Bersuar	150.000.000,00
5.2.02.18.001.00003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	201.195.700,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	11.015.923.068,00
5.2.02.89.001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	10.856.358.768,00
5.2.02.89.001.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	10.856.358.768,00
5.2.02.89.002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	89.564.300,00
5.2.02.89.002.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	89.564.300,00
5.2.02.89.003	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	70.000.000,00
5.2.02.89.003.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	70.000.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.950.751.134,00
5.2.02.99.099	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.950.751.134,00
5.2.02.99.099.09999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.950.751.134,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.814.490.780,93
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	36.580.835.892,93
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	36.580.835.892,93
5.2.03.01.001.00001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.749.634.264,93
5.2.03.01.001.00006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	5.044.185.328,00
5.2.03.01.001.00010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.015.000.000,00
5.2.03.01.001.00011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00
5.2.03.01.001.00012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	566.742.500,00
5.2.03.01.001.00032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	20.895.500.000,00
5.2.03.01.001.00036	Belanja Modal Taman	1.100.000.000,00
5.2.03.01.001.00037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.209.773.800,00
5.2.03.01.002	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00
5.2.03.01.002.00008	Belanja Modal Flat/Rumah Susun	0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.233.654.888,00
5.2.03.99.099	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.233.654.888,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.99.099.09999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.233.654.888,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.061.486.988,48
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	81.331.919.293,80
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	71.581.919.293,80
5.2.04.01.001.00003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	69.195.980.000,00
5.2.04.01.001.00010	Belanja Modal Jalan Lainnya	2.385.939.293,80
5.2.04.01.002	Belanja Modal Jembatan	9.750.000.000,00
5.2.04.01.002.00003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	9.750.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	11.256.038.000,00
5.2.04.02.001	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.235.214.000,00
5.2.04.02.001.00002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	986.064.000,00
5.2.04.02.001.00003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	249.150.000,00
5.2.04.02.004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.067.410.000,00
5.2.04.02.004.00001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.067.410.000,00
5.2.04.02.007	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	7.953.414.000,00
5.2.04.02.007.00001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	7.435.354.000,00
5.2.04.02.007.00004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	518.060.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.473.529.694,68
5.2.04.04.002	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.473.529.694,68
5.2.04.04.002.00003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.473.529.694,68
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	970.986.450,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.787.800,00
5.2.05.01.001	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.787.800,00
5.2.05.01.001.00001	Belanja Modal Buku Umum	1.787.800,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	969.198.650,00
5.2.05.89.001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	969.198.650,00
5.2.05.89.001.00001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	969.198.650,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	162.200.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	162.200.000,00
5.2.06.01.001	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	162.200.000,00
5.2.06.01.001.00005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	162.200.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.829.499.241,05
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.829.499.241,05
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.829.499.241,05
5.3.01.01.001	Belanja Tidak Terduga	6.829.499.241,05
5.3.01.01.001.00001	Belanja Tidak Terduga	6.829.499.241,05
5.4	BELANJA TRANSFER	256.177.156.562,30

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.859.597.562,30
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	12.174.500.000,00
5.4.01.01.003	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	12.174.500.000,00
5.4.01.01.003.00001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	12.174.500.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.685.097.562,30
5.4.01.02.001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.685.097.562,30
5.4.01.02.001.00001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.685.097.562,30
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	241.317.559.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	241.317.559.000,00
5.4.02.05.002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	241.317.559.000,00
5.4.02.05.002.00003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00
5.4.02.05.002.00004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	138.869.629.000,00
5.4.02.05.002.00005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	102.447.930.000,00
	Jumlah Belanja	1.936.652.223.306,00
	Total Surplus/(Defisit)	-68.822.953.231,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	125.322.953.231,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.120.000.000,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	10.000.000.000,00
6.1.01.02.001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	10.000.000.000,00
6.1.01.02.001.00137	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	10.000.000.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	40.120.000.000,00
6.1.01.05.001	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	35.120.000.000,00
6.1.01.05.001.00001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	35.120.000.000,00
6.1.01.05.002	Penghematan Belanja-Belanja Modal	5.000.000.000,00
6.1.01.05.002.00021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	5.000.000.000,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	5.000.000.000,00
6.1.01.08.001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	5.000.000.000,00
6.1.01.08.001.00001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	5.000.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	202.953.231,00
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	202.953.231,00
6.1.05.06.001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	202.953.231,00
6.1.05.06.001.00001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	202.953.231,00
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	70.000.000.000,00
6.1.08.01	Pinjaman Daerah	70.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.08.01.004	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	70.000.000.000,00
6.1.08.01.004.00001	Pinjaman Daerah dari LKBB	70.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	56.500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	56.500.000.000,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	56.500.000.000,00
6.2.03.04.007	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek	56.500.000.000,00
6.2.03.04.007.00001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek	56.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	56.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	68.822.953.231,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
NIP. 19671223 199203 2 004